



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PALANGKA RAYA
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan disusun sebagai upaya untuk dapat diketahuinya kegiatan yang telah dilaksanakan, perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi, sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya, tertibnya administrasi hasil kegiatan serta laporan program dan hasil kegiatan kepada publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dan disampaikan atas pelaksanaan kewajiban Biro Administrasi Pembangunan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 yang merupakan pelaksanaan tahun kedua (ke-5) pelaksanaan Renstra Biro Administrasi Pembangunan tahun 2021 s.d. tahun 2026.

Pelaksanaan kinerja yang termuat dalam laporan ini meliputi: kinerja pengelolaan data dan informasi pembangunan, penyelenggaraan sistem perencanaan maupun pengendalian program pembangunan dan upaya evaluasi dan monitoring pelaporan baik analisis maupun pengkajian kebijakan pembangunan yang bersumber dari dana pusat dan daerah. Target-target kinerja Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan sebagaimana yang telah disusun berdasarkan Rencana Aksi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan 2025 berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah periode 2021 s.d 2026.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan dan bagian yang bermanfaat dari pelaporan kinerja Pemerintah Daerah. Kami menyadari laporan ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan.

Palangka Raya, Januari 2026

Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Kalimantan Tengah,



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
 BAB I P E N D A H U L U A N	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM	4
1.3 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	8
1.4 ISU STRATEGIS	11
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RENCANA STRATEGIS	12
2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA	17
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	26
3.3 REALISASI ANGGARAN	34
 BAB IV P E N U T U P	
4.1 KESIMPULAN	37
4.2 RENCANA TINDAK LANJUT	38
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Hal.
TABEL 1.1 SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG	10
TABEL 2.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025	15
TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	16
TABEL 3.1 PREDIKAT PKO	25
TABEL 3.2 INTERPRETASI PREDIKAT PKO	25
TABEL 3.3 KOREKSI CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BERDASARKAN PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	26
TABEL 3.4 TARGET KINERJA	27
TABEL 3.5 PENILAIAN KINERJA	27
TABEL 3.6 MATRIKS PENILAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025	28
TABEL 3.7 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023, 2024 DAN 2025	29
TABEL 3.8 REALISASI KINERJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BERDASARKAN RENCANA STRATEGIS	30
TABEL 3.9 REALISASI KINERJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BERDASARKAN RPJMD 2021-2026	31
TABEL 3.10 ALOKASI ANGGARAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2021-2025	35
TABEL 3.11 REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG INDIKATOR KINERJA	36



DAFTAR GAMBAR

Hal.

GAMBAR 3.1	PROSES BISNIS	18
GAMBAR 3.2	KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI DENGAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI BAIK	29
GAMBAR 3.3	DIAGRAM CAPAIAN KINERJA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PER TAHUN	30
GAMBAR 3.4	REALISASI KEUANGAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN 2021 – 2025	35



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
LAMPIRAN 2	PERJANJIAN KINERJA 2025
LAMPIRAN 3	RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
LAMPIRAN 4	PENGUKURAN KINERJA 2025
LAMPIRAN 5	PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI (PKO) 2025
LAMPIRAN 5	RENCANA KINERJA TAHUN 2026
LAMPIRAN 6	ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan setiap tahun.

Laporan Kinerja sebagaimana tersebut diatas berfungsi sebagai:

1. Instrumen untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang taat asas.
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan.
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi dan tugasnya sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja.

5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Paragraf 3 Biro Administrasi Pembangunan Pasal 68 Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut Biro Administrasi Pembangunan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan program/kegiatan dari pencapaian kinerja, visi dan misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Dasar hukum penyusunan LKIP Biro Administrasi Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor

37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah

1.2 GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Paragraf 3 Biro Administrasi Pembangunan Pasal 71 Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah susunan organisasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas:

- a) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

- b) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah/wilayah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan

pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Penyiapan penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Penyiapan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

- c) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah/wilayah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaporan pelaksanaan pembangunan, mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan laporan, dan penyajian data.

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dalam pelaksanaan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

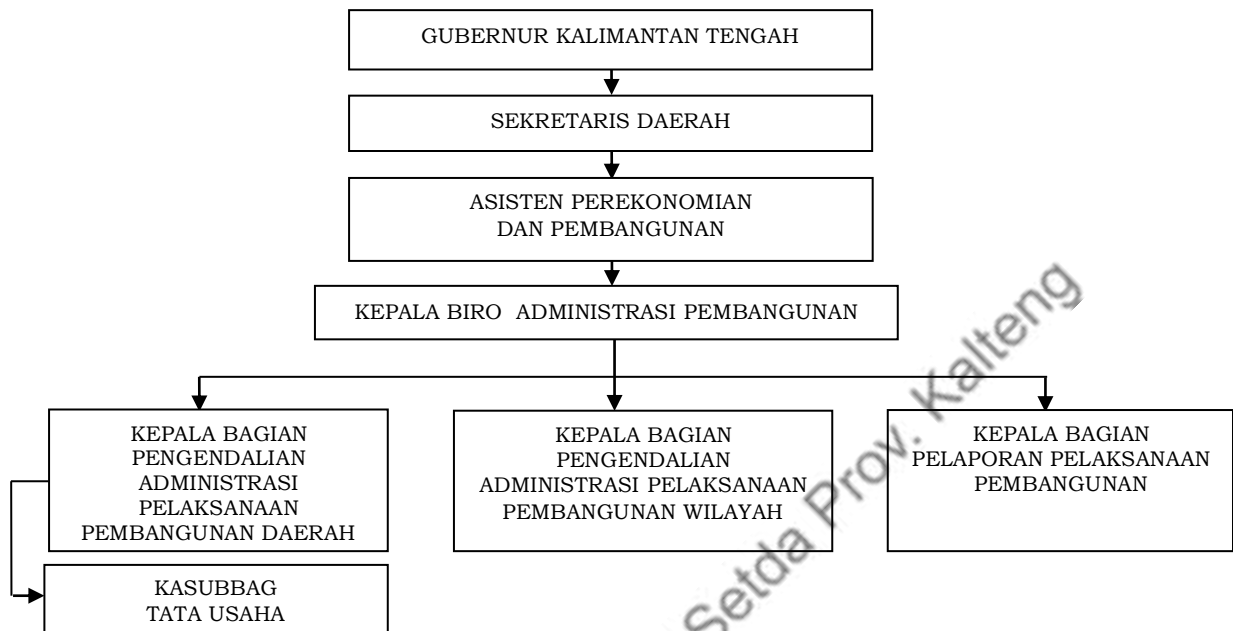
1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan

- pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah;
2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah/wilayah di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah;
 3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang analisis capaian kinerja pembangunan daerah, pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah dan pembangunan wilayah, dan kebijakan pembangunan daerah; dan
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Struktur Organisasi mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.3.1 Sumber Daya Manusia

Personel Biro Administrasi Pembangunan terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) orang ASN, yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) orang PNS dengan pendidikan 8 (delapan) orang Pascasarjana (S2), 11 (Sebelas) orang Sarjana (S1), 3 (tiga) orang SLTA dan 11 orang CPNS dengan pendidikan 10 (sepuluh) orang Sarjana (S1) dan 1 (satu) orang Diploma (D3) serta 5 (lima) orang PPPK dengan pendidikan 3 (tiga) orang Sarjana (S1) dan 2 (dua) orang SMA. Jurusan pendidikan bervariasi dari berbagai jurusan pendidikan. Dengan keterangan sebagai berikut:

- a. Aparatur Sipil Negara sebanyak = 38 (dua puluh empat) orang
- b. Menurut Golongan:
 - Golongan IV = 5 (lima) orang
 - Golongan III = 27 (dua puluh tujuh) orang
 - Golongan II = 1

c. Menurut Jabatan:

- | | | |
|----------------|---|----------------|
| - Eselon II/b | = | 1 (satu) orang |
| - Eselon III/a | = | 2 (dua) orang |
| - Eselon IV/a | = | 1 (satu) orang |

d. Menurut Pendidikan:

- | | | |
|--------------|---|--------------------|
| - Sarjana S2 | = | 8 (delapan) orang |
| - Sarjana S1 | = | 21 (sebelas) orang |
| - Diploma | = | 1 (satu) orang |
| - SLTA | = | 3 (tiga) orang |

e. Menurut Jenis Kelamin:

- | | | |
|-------------|---|---------------------------|
| - Laki-laki | = | 21 (dua puluh satu) orang |
| - Perempuan | = | 17 (tujuh belas) orang |

1.3.2. Sumber Daya Keuangan

Guna menunjang pelaksanaan tugas fungsi, pada Biro Administrasi Pembangunan tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran pagu awal dan perubahan sebesar Rp2.466.368.721,90 (Dua Miliar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Koma Sembilan Puluh Rupiah). Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

1.3.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Daftar sarana prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana Penunjang

NO.	JENIS PERLENGKAPAN	JUMLAH	KONDISI			
			Lengkap	Kurang	Mencukupi	Lainnya
A.	Alat Angkutan Darat Bermotor					
1.	Mini Bus	1 Unit			Mencukupi	
2.	Sepeda Motor	11 Unit			Mencukupi	
B.	Alat Kantor					
1.	Mesin Ketik Listrik	2 Buah			Mencukupi	
2.	Lemari Besi/Metal	7 Buah			Mencukupi	
3.	Filing Cabinet Besi	2 Buah			Mencukupi	
4.	Brandkas	1 Buah			Mencukupi	
C.	Alat Kantor Lainnya					
1.	Alat Penghancur Kertas	3 Buah			Mencukupi	
2.	Alat Kantor Lainnya	12 Buah			Mencukupi	
D.	Meubelair					
1.	Kursi Rapat	25 buah			Mencukupi	
E.	Alat Rumah Tangga Lainnya					
1.	Camera Video	3 Buah			Mencukupi	
F.	Peralatan Komputer					
1.	Komputer PC	35 Unit			Beberapa memerlukan perawatan dan penggantian	
2.	Note Book	18 Unit			Beberapa memerlukan perawatan dan penggantian	
3.	Komputer Unit lainnya	5 Unit			Mencukupi	
G.	Peralatan Personal Komputer					
1.	Printer	24 Buah			Beberapa memerlukan perawatan dan penggantian	
2.	Scanner	3 Buah			Mencukupi	
3.	External/Portable Hardisk	4 Buah			Mencukupi	
4.	Peralatan Personal Komputer Lainnya	6 Buah			Mencukupi	
5.	Peralatan Komputer Lainnya	11 Buah			Mencukupi	
H.	Peralatan Studio Audio					
1.	Digital Audio Taperecorder	2 Buah			Mencukupi	
I.	Peralatan studio Video dan Film					
1.	Layar Film/Projector	4 Buah			Mencukupi	
J.	Alat Studio Lainnya					
1.	Alat Studio Lainnya	2 Buah			Mencukupi	
K.	Alat Komunikasi					
1.	Alat Komunikasi Sosial Lainnya	7 Buah			Mencukupi	
Q.	Lainnya					
1.	AC	8 Buah			Mencukupi	
2.	Kursi Tamu	6 Set			Mencukupi	
3.	Meja Rapat	2 Set			Mencukupi	
4.	Meja Kursi Kerja	40 Set			Mencukupi	
II.	Prasarana Penunjang					
1.	Kantor	1 Ruang			Mencukupi	

1.4 ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tak bias lepas dari isu-isu penting utamanya. Beberapa isu tersebut, yaitu:

1. Terlaksananya himpunan laporan dan pengendalian kegiatan pembangunan yang dimulai sejak tahun 2008 dan terus berlanjut;
2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana DAK, APBD, APBN untuk Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Kabupaten/Kota yang sinergi dengan program strategis nasional yang disalurkan dari Kementerian ke instansi teknis.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi yaitu :

1. Tujuan pengendalian perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dan rencana dari Biro Administrasi Pembangunan kurang tercapai;
2. Permintaan target pelaksanaan program kegiatan yang meningkat tidak dibarengi dengan perbaikan kualitas peningkatan kinerja, perbaikan kualitas perencanaan supaya pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan;
3. kurangnya pemahaman tentang tupoksi yang baik dan benar sehingga pelaksanaan kegiatan masih jauh dari target yang diharapkan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 s.d tahun 2026. Rencana strategis Biro Administrasi Pembangunan ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 s.d. tahun 2026.

1. VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, masa bakti Tahun 2021-2026 dan telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Religius,
Kuat, Amanah dan Harmonis.”

Untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan Administrasi Pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang.

Tugas Utama Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah Membangun Pelayanan Aparatur

Pemerintah yang memenuhi azas tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih dalam melayani masyarakat / publik di Provinsi Kalimantan tengah.

Sejalan dengan visi Gubernur tersebut Biro Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

2. MISI

- a. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
- b. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
- c. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
- d. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
- e. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan yang hendak dicapai pada Biro Administrasi Pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan pada Biro Administrasi Pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Biro

Administrasi Pembangunan tahun 2021 s.d tahun 2026 sebanyak 5 (lima) sasaran strategis, meliputi:

1. Meningkatkan sistem administrasi pembangunan daerah yang akuntabel dalam melayani masyarakat/publik;
2. Peningkatan pelaporan, analisis dan pengkajian pembangunan;
3. Peningkatan pengendalian pembangunan daerah;
4. Peningkatan pelayanan dan pengembangan data/informasi;
5. Peningkatan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

4. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Strategi Biro Administrasi Pembangunan

1. Meningkatnya efektifitas dan kinerja melalui peningkatan tata kelola administrasi pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens terhadap pelaksanaan capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah;
3. Meningkatkan kapasitas cakupan maupun kualitas pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi keuangan melalui optimalisasi koordinasi dan fasilitasi pembinaan.

Kebijakan Umum Biro Administrasi Pembangunan

1. Meningkatkan kualitas data informasi dan pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
2. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan;
3. Peningkatan akurasi data/informasi pembangunan untuk pengambilan kebijakan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan dan dapat memberi solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah.

Berdasarkan visi, misi yang telah ditetapkan di atas, maka Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dituangkan dalam Tabel IKU.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO.	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen data dan capaian realisasi keuangan dan pembangunan yang tepat waktu/ total dokumen x 100%	Biro Administrasi Pembangunan
		Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah/ total dokumen x 100%	
2.	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	jumlah penyampai data pengadaan barang/jasa pemerintah/total penyampai data keseluruhan x 100%	Biro Administrasi Pembangunan

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Rencana Kinerja disusun Biro Administrasi Pembangunan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis sehingga mendukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Perjanjian Kinerja berisi target Renstra Biro Administrasi Pembangunan tahun 2025 dimana kegiatan pokok/utama adalah meningkatnya cakupan layanan dalam pelaporan yang bersumber

dari dana pusat dan daerah dan meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan data informasi pembangunan.

Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	100%
		Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	100%
2	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

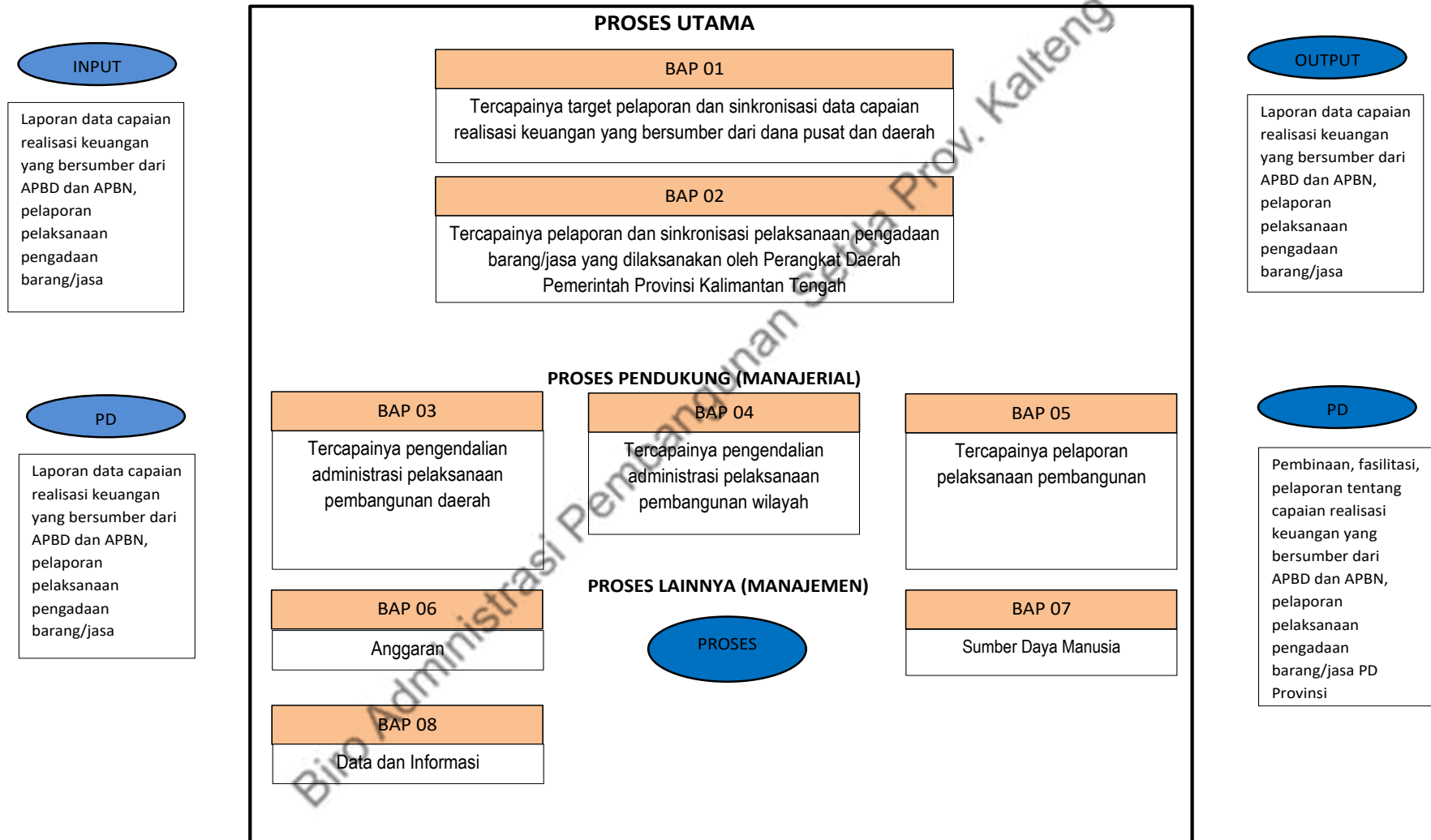
Pengukuran kinerja adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit kerja. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya informasi kinerja yang lengkap, unit kerja dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerja.

Biro Administrasi Pembangunan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja. Untuk menilai keberhasilan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah perlu dilakukan pengukuran capaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2025. Hasil pengukuran capaian target kinerja disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

Untuk menggambarkan hubungan akuntabilitas kinerja yang efektif dan efisien serta dapat menghasilkan kinerja sesuai dengan visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka disusunlah proses bisnis visi, misi, tujuan dan sasaran. Hasil pemetaan akar permasalahan disajikan dalam proses bisnis beserta *logframe* yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan dapat dicermati pada Gambar 3.1 dan 3.2.

Gambar 3.1
Proses Bisnis

PETA PROSES BISNIS BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

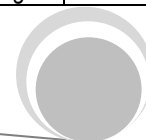


IDENTIFIKASI PROSES

NO.	SASARAN (nama proses)	UTAMA/ PENDUKUNG LAINNYA	KODE
1	2	3	4
1.	Tercapainya target pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	UTAMA	BAP 01
2.	Tercapainya pelaporan dan sinkronisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	UTAMA	BAP 02
3.	Tercapainya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	PENDUKUNG	BAP 03
4.	Tercapainya pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah	PENDUKUNG	BAP 04
5.	Tercapainya pelaporan pelaksanaan pembangunan	PENDUKUNG	BAP 05
6.	Anggaran	PENDUKUNG	BAP 06
7.	Sumber Daya Manusia	PENDUKUNG	BAP 07
8.	Data dan Informasi	PENDUKUNG	BAP 08

KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	BIDANG URUSAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi							
1.	Tercapainya target pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	1. Meningkatnya efektifitas dan kinerja melalui peningkatan tata kelola administrasi pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah 2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens terhadap pelaksanaan capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah 3. Meningkatkan kapasitas cakupan maupun kualitas pelaporan dan sinkronisasi data capaian realisasi keuangan melalui optimalisasi koordinasi dan fasilitasi pembinaan.	1. Meningkatkan kualitas data informasi dan pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 2. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan 3. Peningkatan akurasi data/informasi pembangunan untuk pengambilan kebijakan	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Urusan pemerintah daerah	Biro Administrasi Pembangunan
2.	Tercapainya pelaporan dan sinkronisasi pengadaan barang/jasa melalui tender dan nontender yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens sesuai SOP terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui tender dan nontender yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	Melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan dan dapat memberi solusi terhadap kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah.	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Urusan pemerintah daerah	Biro Administrasi Pembangunan



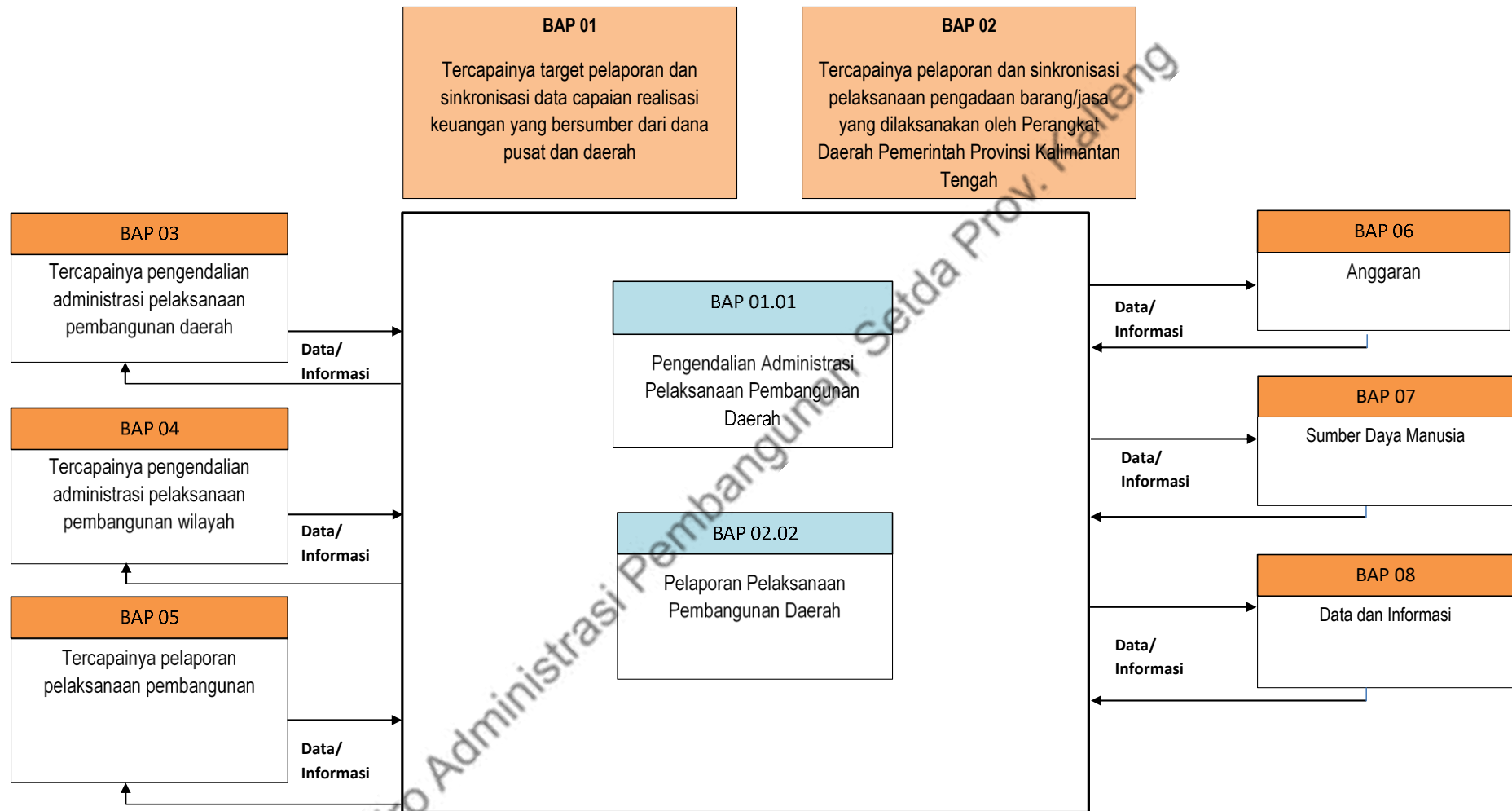
PETA RELASI



IDENTIFIKASI SUB PROSES - LINTAS FUNGSI

NO.	SUB PROSES	KODE	NAMA LINTAS FUNGSI	KODE
1	2	3	4	5
1.	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BAP 01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	BAP 01.01.01
2.	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BAP 02.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	BAP 01.01.02
3.			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	BAP 01.01.03
4.			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	BAP 02.02.01
5.			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	BAP 02.02.02
6.			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	BAP 02.02.03

PETA SUB PROSES



Adapun perhitungan capaian kinerja mencakup prosentase capaian target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan melalui realisasi yang dicapai. Perlunya ditetapkan cara pengukuran kinerja sebagai bukti bahwa keberhasilan pelaksanaan kinerja di Biro Administrasi Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Kalteng sudah akuntabel dan pembanding bagi proses pengukuran kinerja untuk tahun berikutnya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Jika semakin rendah realisasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah semakin rendah, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

Setelah capaian kinerja telah diukur selanjutnya dilakukan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO). PKO adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, terdapat 5 (lima) predikat yang digunakan untuk menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi dengan mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 (satu) level di atas Entitas Akuntabilitas Kinerja yang dinilai, sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.

Tabel 3.1
Predikat PKO

Nilai Kinerja Organisasi (PKO)	Predikat PKO	Warna
ISTIMEWA	$X > 100\%$	
BAIK	$80\% < X \leq 100\%$	
BUTUH PERBAIKAN	$60\% < X \leq 80\%$	
KURANG	$20\% < X \leq 60\%$	
SANGAT KURANG	$0\% < X \leq 20\%$	

Sumber: Permenpan Nomor 22 Tahun 2024

Selanjutnya, setiap predikat PKO memiliki makna yang menggambarkan tingkatan kualitas capaian kinerja organisasi. Terjemahan pada setiap predikat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Interpretasi Predikat PKO

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

Adapun predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja. Semakin tinggi predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menunjukkan bahwa manajemen kinerja organisasi semakin baik, sehingga semakin tinggi pula capaian perjanjian kinerja yang diakui. Sebaliknya, semakin rendah predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah semakin rendah pula capaian perjanjian kinerja yang diakui sebagaimana yang tertera pada gambar berikut:

Tabel 3.3
Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Predikat AKIP	Interpretasi	Keterangan
AA	0%	Pada Tahun 2025 Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah “B” (62,30 kategori baik) dengan koreksi capaian PK setelah normalisasi sebesar 15%
A		
BB	10%	
B	15%	
CC	20%	
C	30%	
D		

Dalam melaksanakan PKO, perlu memperhatikan prinsip pelaksanaan untuk memastikan hasil penilaian reliable dan dapat diandalkan. Adapun prinsip yang dimaksud antara lain:

- a. Berorientasi hasil, menggambarkan kondisi terkait tingkatan nilai kinerja organisasi;
- b. Berkelanjutan, pelaksanaan penilaian kinerja didukung dengan pengumpulan data yang berlangsung secara terus menerus sepanjang tahun;
- c. Objektif, pelaksanaan penilaian kinerja yang dilakukan dapat diukur dan dilakukan pengujian oleh pihak lain untuk memastikan kebenaran hasil penilaian;
- d. Adil, penilaian dilakukan berdasarkan ukuran kinerja atau standar yang telah ditetapkan dan sasaran yang jelas;
- e. Transparan, penilaian kinerja menggunakan parameter pengukuran dan sumber data yang jelas serta dilakukan secara terbuka;
- f. Akuntabel, pelaksanaan penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan kriteria dan prosedur yang jelas; dan
- g. Periodik, penilaian kinerja dilakukan secara berkesinambungan dalam kurun waktu yang tetap.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 selanjutnya akan disajikan sebagai berikut:

1. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan perjanjian kinerja Biro Administrasi Pembangunan, maka target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025 dapat dicermati sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Target Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	1. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	%	100
		2. Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	%	100
2.	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	3. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	%	100

Sumber: PK Biro Administrasi Pembangunan 2025

2. Penilaian Kinerja Organisasi

Biro Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja pada masing-masing indikator sebagai berikut:

Tabel 3.5 Penilaian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	1. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	%	100	100	100%
		2. Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	%	100	100	100%
2	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	%	100	100,00	100%

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah terakhir yang dikeluarkan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjuk sebagai evaluator internal, predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah “B” (62,30 kategori baik) dengan koreksi capaian PK setelah normalisasi sebesar 15%.

Hasil perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dijabarkan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Matriks Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

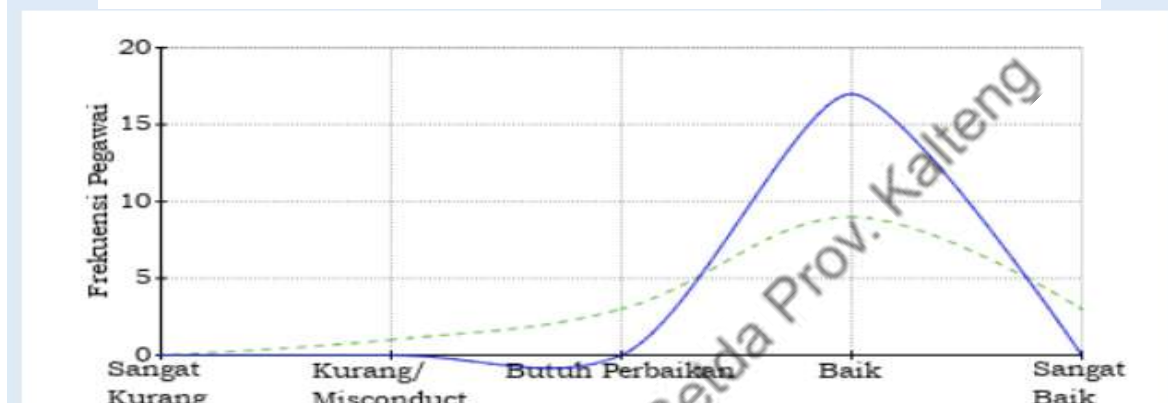
N o	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	"Nilai Akhir Capaian PK (3)
1	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	1 Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	%	100	100	100	100	15%	85%
		2 Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	%	100	100	100	100	15%	85%
2	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	1 Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	%	100	100	100	100	15%	85%
Total Capaian PK									255%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK									85%
Predikat PKO									Baik

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan 2025

Setelah melakukan perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah dan mempertimbangkan ekspektasi pimpinan 1 level di atasnya yaitu Sekretaris

Daerah. Maka Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) yang diperoleh Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan **Baik** sesuai dengan ekspektasi yang disampaikan pimpinan melalui aplikasi ekinerja.bkn.go.id.

Gambar 3.2
Kurva Distribusi Predikat Kinerja Pegawai dengan Capaian Kinerja Organisasi Baik



3. Pengukuran capaian kinerja dengan tahun sebelumnya

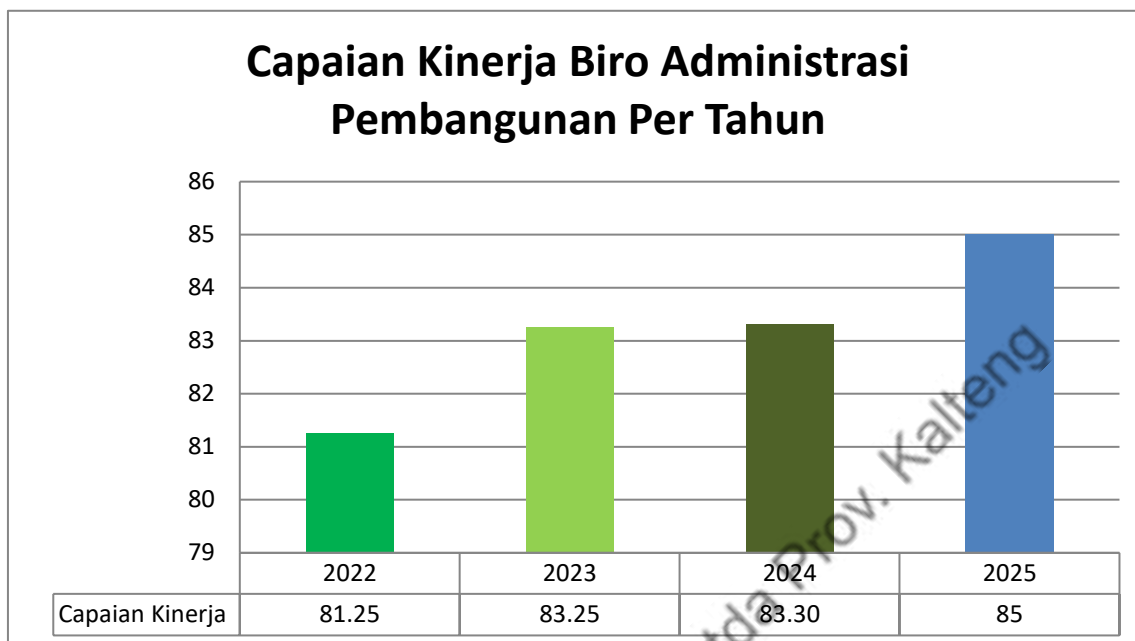
Berikut disajikan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023, 2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025			Ket
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	%	100	100	100,00	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	%	100	100	90,07	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	%	95	89,14	93,83	98	92,13	94,01	100	100	100	

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng, 2025, data primer

Gambar 3.3
Diagram Capaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Per Tahun



Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng, 2025, data primer

4. Membandingkan pengukuran kinerja dengan target dalam rencana strategis

Berikut disajikan perbandingan pengukuran kinerja dengan target dalam rencana strategis.

Tabel 3.8
Realisasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Berdasarkan Rencana Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (Tahun)				
			2022	2023	2024	2025	2026
Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	1. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	%	100	100	100	100	100
	Realisasi		100	100	100	100	
	Capaian		100	100	100	100	
	2. Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	%	100	100	100	100	100
	Realisasi		80,25	100	100	100	
	Capaian		80,25	100	100	100	

Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	3. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	%	90	95	98	100	100
	Realisasi		95,86	89,14	92,13	100	
	Capaian		106,51	93,83	94,01	100	

Sumber: Renstra Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng, 2022, data primer

5. Membandingkan pengukuran kinerja dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Tabel 3.9
Realisasi Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target (Tahun)				
			2022	2023	2024	2025	2026
Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	1. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah		100	100	100	100	100
	Realisasi		100	100	100	100	
	Capaian		100	100	100	100	
	2. Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah		100	100	100	100	100
	Realisasi		80,25	100	100	100	
	Capaian		80,25	100	100	100	
Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	3. Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah		90	95	98	100	100
	Realisasi		95,86	89,14	92,13	100	
	Capaian		106,51	93,83	94,01	100	
Capaian Kinerja			81,25 (Baik)	83,25 (Baik)	83,30 (Baik)	85,00 (Baik)	

Sumber: Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng, 2022, data primer

Perumusan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam mendukung keberhasilan capaian kinerja. Indikator Kinerja Biro Organisasi telah mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang secara langsung menunjukkan progress kinerja yang telah dan akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Indikator Kinerja Utama pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah terdiri sebagai berikut :



Capaian indikator kinerja Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah dilaksanakan pada pendanaan subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD, Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN dan Subkegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah. Indikator kinerja ini terlaksana dengan adanya koordinasi dan fasilitasi terhadap monitoring, evaluasi dan penyerapan anggaran dana APBD dan APBN pada Kabupaten/Kota dan Provinsi, proses analisis dan kompilasi data dan informasi serapan anggaran, identifikasi dan analisis kendala permasalahan pelaksanaan pembangunan yang berjalan serta capaian kegiatan fisik prasarana pendanaan APBD dan APBN strategis dan non strategis pada wilayah I, II dan III se-Kalimantan Tengah.

Jumlah persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 100,00% dihitung dari Jumlah dokumen data dan capaian realisasi keuangan dan pembangunan yang tepat waktu/total data keseluruhan x 100%.

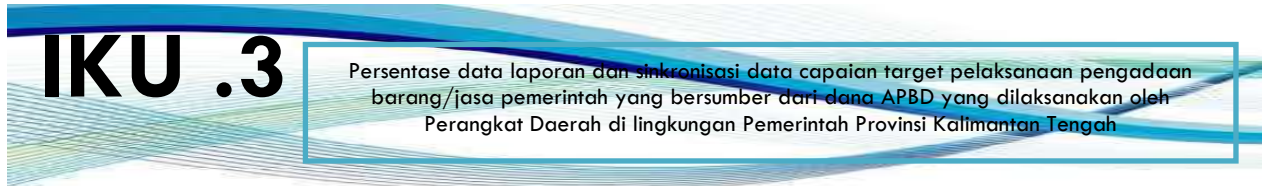
Capaian indikator kinerja berupa persentase penyajian data informasi tentang pembangunan daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan melalui pendanaan pada Subkegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat, dan terkini sebagai dasar evaluasi dan pengambilan kebijakan strategis oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyajian data dan informasi pembangunan daerah tersebut diperoleh dari berbagai sumber resmi yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan anggaran dan pembangunan. Salah satunya adalah melalui kegiatan evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (EPRA), yang mencakup berbagai jenis data utama seperti: realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencakup pendanaan dari mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama; data penerimaan pendapatan daerah; pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK); serta data terkait pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP).

Selain itu, data yang disajikan juga mencakup aspek belanja wajib perlindungan sosial, khususnya yang dialokasikan dalam rangka penanganan dampak inflasi sebagai bagian dari kebijakan jaring pengaman sosial daerah. Tidak hanya itu, penyusunan data dan informasi juga dilengkapi melalui hasil monitoring lapangan terhadap proyek-proyek strategis daerah, yang dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi pelaksanaan pekerjaan guna memperoleh gambaran mengenai progres fisik maupun kendala pelaksanaan di lapangan.

Seluruh data yang dikompilasi dan disajikan tersebut diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung pengambilan kebijakan pembangunan daerah. Data ini menjadi landasan analisis dalam proses penyusunan arahan kebijakan, serta digunakan sebagai acuan dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan. Jumlah persentase penyajian data informasi tentang pembangunan daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar

100% dari target 100% dihitung dari jumlah dokumen data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah/total dokumen x 100%.



Proses pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik tender/nonseleksi maupun nontender/nonseleksi bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia serta mendorong pemerataan ekonomi. Kualitas pekerjaan setelah pelaksanaan pengadaan perlu diperhatikan meskipun ada upaya percepatan penyerapan anggaran sehingga tercapai kuantitas dan kualitas yang tepat. Seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan tidak hanya mengejar target penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kualitas pekerjaan yang dilaksanakan.

Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 sebesar 100% dari target 100% dihitung dari jumlah penyampai data pengadaan barang/jasa pemerintah/total penyampai data keseluruhan x 100%.

3.3 REALISASI ANGGARAN

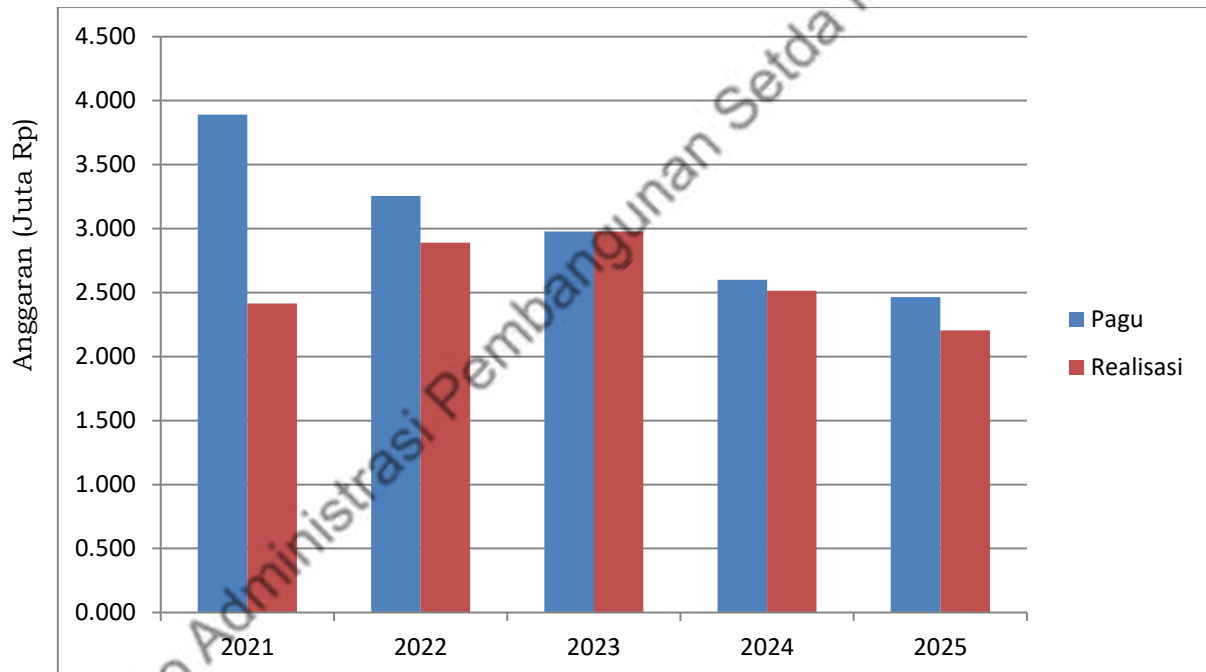
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksinya, Biro Administrasi Pembangunan pada tahun 2025 didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2025 sebesar Rp3.157.783.848,11 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) tahun 2025 sebesar Rp2.466.368.721,90. Alokasi anggaran dan realisasi keuangan tahun 2021 sampai tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.10 dan Gambar 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.10
Alokasi Anggaran Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2025

NO	ALOKASI ANGGARAN	TAHUN (Rp)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pagu Perubahan (Rp)	3.890.237.150,00	3.256.175.000,00	2.978.662.908,00	2.599.243.761,00	2.466.368.721,90
2.	Realisasi Keuangan (Rp)	2.415.414.157,00	2.890.676.029,00	2.878.200.936,00	2.514.503.243,00	2.205.187.350,00
3.	Prosentase Realisasi (%)	62,09%	88,78%	96,63%	96,74%	89,41%

Sumber: DPPA-SKPD Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2025

Gambar 3.4
Realisasi Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Tahun 2021-2025



Capaian realisasi keuangan pada Biro Administrasi Pembangunan tahun 2025 sebesar Rp2.205.187.350,00 (89,41%) dari pagu perubahan sebesar Rp2.466.368.721,90. Adapun capaian realisasi program dan kegiatan yang mendukung terlaksananya indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Program Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja

No	Program	Kegiatan	Anggaran-P 2025 (Rp.)	Realisasi Keuangan 2025	
				(Rp)	(%)
1.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		787.903.522	1.262.872.712	91,70
	1.	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	515.116.522	471.024.250	91,44
	1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	291.936.500	258.880.600	88,68
	1.2	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	52.242.522	49.912.000	95,54
	1.3	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	170.937.500	162.231.650	94,91
	2.	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	272.787.000	251.461.000	92,18
	2.1	Sub Kegiatan Analisis Capaian Pembangunan Daerah	59.379.000	55.256.000	93,06
	2.2	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	74.992.000	74.992.000	100,00
	2.3	Sub Kegiatan Fasilitas Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	138.416.000	121.213.000	87,57

Program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja telah direalisasikan sebesar 91,70%. Adapun anggaran yang tidak direalisasikan berupa kegiatan makan minum rapat yang tidak terlaksana, Honorarium Narasumber/Pembahas, Belanja Cetak, Perjalanan dinas dan yang lainnya berupa selisih harga antara pagu dan realisasi.



BAB IV

P E N U T U P

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Laporan kinerja ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi Perangkat Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

4.1 KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah ini menyajikan capaian strategis yang ditunjukkan pada tahun anggaran 2025. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran dari Renstra, maupun analisis kinerjanya.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan kategori "Baik". Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya memerlukan komitmen dan kerja keras semua komponen baik pimpinan, pejabat maupun pelaksana didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif, perencanaan kinerja yang matang dan koordinasi yang mantap dalam pelaksanaan kegiatan.

4.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil analisis terhadap pencapaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, diperlukan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1. Reviu dan perbaikan terhadap sasaran strategis, indikator kinerja, dan target jangka menengah;
2. Rencana program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, hendaknya dapat terus disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika pelaksanaan tugas yang dihadapi. Langkah penyesuaian dan implementasi secara nyata pelaksanaan berbagai kegiatan dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar sesuai target yang telah ditetapkan;
3. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran di lingkungan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan tugas dan fungsi;
4. Perlu upaya strategis dan inovatif agar kegiatan di Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilaksanakan secara optimal melalui pendekatan yang aktif, interaktif dan partisipatif.

Palangka Raya, Januari 2026

Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196908061989111002

LAMPIRAN

Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kalteng





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon/Faksimile (0536) 3221716, Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si**

Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMAD KATMA F. DIRUN**

Jabatan : Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik maka perlu untuk menetapkan indikator kinerja utama tahun 2021-2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kegiatan kinerja.

Palangka Raya, 31 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO,

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
NIP 196908061989111002

Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD KATMA F. DIRUN
NIP 196610221993081001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon/Faksimile (0536) 3221716, Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Unit : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tugas dan Fungsi:

membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

- Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Cara Perhitungan	Sumber Data
1.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen data dan capaian realisasi keuangan dan pembangunan yang tepat waktu/ total dokumen x 100%	Biro Administrasi Pembangunan
		Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah dokumen data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah/ total dokumen x 100%	Biro Administrasi Pembangunan
2.	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Jumlah penyampai data pengadaan barang/jasa pemerintah/ total penyampai data keseluruhan x 100%	Biro Administrasi Pembangunan

Palangka Raya, 31 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
NIP 196908061989111002



Pihak Kedua,
PIHAK SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMAD KATMA F. DIRUN
NIP 196610221993081001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon/Faksimile (0536) 3221716, Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si**

Jabatan : **KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMAD KATMA F. DIRUN**

Jabatan : **Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 31 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO,

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
NIP 196908061989111002



Pihak Kedua,
Plt. SEKRETARIS DAERAH,

MUHAMAD KATMA F. DIRUN
NIP 196610221993081001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.T.A. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon/Faksimile (0536) 3221716, Laman www.kalteng.go.id, Pos-el sekda@kalteng.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	%	100
		Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	%	100
2.	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	%	100

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp2.042.028.826,11	
2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp1.115.755.022	

Palangka Raya, 31 Januari 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BIRO,

Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
NIP 196908061989111002

Pihak Kedua,
PIH. SEKRETARIS DAERAH,



MUHAMAD KATMA F. DIRUN
NIP 196610221993081001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon 0536-3239379 Pos-el biroadbang@kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si**

Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, 31 Januari 2025

KEPALA BIRO,



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si

NIP. 196908061989111002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon 0536-3239379 Pos-el biroadbang@kalteng.go.id

A. Target Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	%	100	25	25	25	25	
		Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	%	100	25	25	25	25	
2.	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	%	100	25	25	25	25	

B. Target Realisasi Keuangan

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan		1.115.755.022	239.088.300	316.714.200	357.197.772	202.754.750	
	1.	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	696.839.022	163.406.000	182.938.500	214.658.522	135.836.000	

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Target Realisasi Keuangan (Rp.)				Ket
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
	1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	359.349.000	80.195.000	99.478.500	99.478.500	80.196.000	
	1.2	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	83.915.022	12.669.000	19.003.500	39.573.522	12.669.000	
	1.3	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	253.575.000	70.541.000	64.456.500	75.606.500	42.971.000	
	2.	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	418.916.000	75.682.300	133.775.700	142.539.250	66.918.750	
	2.1	Sub Kegiatan Analisis Capaian Pembangunan Daerah	109.271.000	21.854.200	32.781.300	38.244.850	16.390.650	
	2.2	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	116.602.000	15.219.500	43.081.500	46.381.500	11.919.500	
	2.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	193.043.000	38.608.600	57.912.900	57.912.900	38.608.600	

Palangka Raya, 31 Januari 2025

KEPALA BIRO



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si
NIP. 196908061989111002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD

: BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tahun Anggaran

: 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
1	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	100 %	100 %	100,00
		Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	100 %	100 %	100,00
2	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	100 %	100 %	100,00

Jumlah Anggaran :

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2025 : Rp2.466.368.721,90

Palangka Raya, Januari 2025

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si

Pemimpin Utama Muda

NIP 196908061989111002

	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian (1)
a	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	100	100	100,00	100,00
	Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	100	100	100,00	100,00
an n	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	100	100	100,00	100,00
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau R					

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) (1)x(100%-(2))
1	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian Realisasi Keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	100	100	100,00	100,00	15%	85,00%
		Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	100	100	100,00	100,00	15%	85,00%
2	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	100	100	100,00	100,00	15%	85,00%
							Total Capaian PK	255,00%
							Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK	85,00%
							Predikat PKO	BAIK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Jalan RTA. Milono Nomor 1, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111,
Telepon 0536-3239379 Pos-el biroadbang@kalteng.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Tercapainya Target Pelaporan dan Sinkronisasi data Capaian realisasi keuangan yang bersumber dari dana pusat dan daerah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target realisasi keuangan APBD, APBN Provinsi/Kab/ Kota serta pembangunan fisik prasarana se-Kalimantan Tengah	%	100
		Persentase penyajian data dan sinkronisasi data informasi tentang pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Tengah	%	100
2.	Tercapainya Pelaporan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Persentase data laporan dan sinkronisasi data capaian target pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersumber dari dana APBD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	%	100

Palangka Raya, 31 Januari 2025

KEPALA BIRO



Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si

NIP. 196908061989111002

**ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

URAIAN	ANGGARAN					REALISASI ANGGARAN				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	3.886.958.150	3.256.175.000	2.978.662.908	2.599.243.761	2.462.448.722	2.413.584.157	2.890.676.029	2.878.200.936	2.514.503.243	2.205.187.350
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	1.172.292.000	1.272.511.600	1.040.842.807	1.299.243.761	1.674.545.200	785.623.007	990.024.479	986.637.468	1.251.630.331	1.482.702.100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.210.000	29.489.000	29.943.000	16.179.789	34.566.350	15.423.000	17.878.000	22.101.250	13.732.250	16.136.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.600.000	8.304.000	8.472.000	4.620.000	8.408.600	9.745.000	5.245.000	5.936.000	4.612.625	5.239.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	0	2.002.000	1.980.000	1.980.000	5.612.500	0	875.000	900.000	1.958.900	2.831.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	0	2.288.000	2.310.000	2.381.300	5.215.500	0	1.000.000	1.650.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	0	2.860.000	2.904.000	1.544.000	4.598.500	0	1.875.000	2.220.000	1.543.875	4.470.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD	0	3.146.000	3.168.000	1.740.000	5.586.250	0	1.375.000	2.340.000	1.739.800	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	3.279.000	3.345.000	1.814.000	5.145.000	0	1.830.000	2.688.250	1.813.150	1.730.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.610.000	7.610.000	7.764.000	2.100.489	0	5.678.000	5.678.000	6.367.000	2.063.900	1.865.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.830.000	17.818.000	13.979.400	816.000	3.050.000	4.576.000	14.598.000	11.868.075	815.900	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.530.000	3.530.000	3.601.500	0	1.525.000	1.920.000	1.920.000	2.680.000	0	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.300.000	14.288.000	10.377.900	816.000	1.525.000	2.656.000	12.678.000	9.188.075	815.900	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					46.335.500					35.066.002
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					46.335.500				35.066.002	35.066.002
Administrasi Umum Perangkat Daerah	472.671.000	514.407.000	438.453.848	747.681.961	1.272.626.210	314.171.900	473.928.150	412.116.496	724.230.826	1.206.923.406
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	140.921.000	140.921.000	143.777.200	336.310.600	427.085.300	106.945.400	109.784.750	127.407.850	319.709.675	418.910.149
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.750.000	40.000.000	40.811.400	25.302.661	34.428.600	18.920.000	32.920.000	32.249.450	23.041.275	20.270.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	306.000.000	333.486.000	253.863.248	328.375.000	183.121.189,90	188.306.500	331.223.400	252.459.196	325.452.085	160.655.176
Penyediaan Bahan/Material	0	0	0	13.700.000	0	0	0	0	13.530.000	0
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	0	43.993.700	7.800.000	0	0	0	42.497.791	0
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					620.191.120					607.088.081
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	621.591.000	665.797.600	512.553.759	494.795.011	202.814.640	417.773.907	446.450.529	501.967.847	484.050.630	184.974.192
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	67.000.000	177.660.000	181.264.500	177.660.000	0	50.279.000	162.855.000	181.100.250	177.660.000	0
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	139.000.000	139.000.000	141.969.259	0	0	86.591.620	137.093.610	132.417.125	0	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	415.591.000	349.137.600	189.320.000	317.135.011	202.814.640	280.903.287	146.501.919	188.450.472	306.390.630	184.974.192
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.990.000	45.000.000	45.912.800	39.771.000	115.152.500	31.678.200	37.169.800	38.583.800	28.800.925	39.602.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000	20.000.000	20.405.800	14.264.000	90.002.500	13.988.200	16.444.800	19.313.800	13.454.250	28.317.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.990.000	25.000.000	25.507.000	25.507.000	25.150.000	17.690.000	20.725.000	19.270.000	15.346.675	11.285.000
PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2.714.666.150	1.983.663.400	1.937.820.101	1.300.000.000	787.903.522	1.629.961.150	1.900.651.550	1.891.563.468	1.262.872.712	722.485.250
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.043.741.450	1.085.953.400	1.045.275.101	800.000.000	515.116.522	879.777.950	1.051.118.450	1.017.580.594	783.627.021	471.024.250
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	473.532.500	354.646.500	355.007.300	303.000.000	291.936.500	223.068.500	338.732.850	337.891.100	296.792.559	258.880.600
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	288.086.500	212.609.900	216.862.000	147.000.000	52.242.522	242.864.800	204.671.900	211.880.850	138.954.425	49.912.000
Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	482.122.450	518.697.000	473.405.801	350.000.000	170.937.500	413.844.650	507.713.700	467.808.644	347.880.037	162.231.650
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.670.924.700	897.710.000	892.545.000	500.000.000	272.787.000	750.183.200	849.833.100	873.982.874	479.245.691	251.461.000
Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	200.000.000	180.000.000	132.600.000	150.000.000	59.379.000	138.413.400	179.550.000	132.026.250	148.218.300	55.256.000
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	200.000.000	205.000.000	132.600.000	150.000.000	74.992.000	158.485.000	157.273.100	132.599.750	141.274.275	74.992.000
Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1.270.924.700	512.710.000	627.345.000	200.000.000	138.416.000	453.284.800	512.710.000	609.356.874	189.753.116	121.213.000